

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Munculnya persoalan sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktifitas manusia. Sebagaimana diketahui, tanpa disadari bahwa setiap individu atau kelompok masyarakat di dalam melakukan kegiatannya sehari-hari pasti menghasilkan sampah. Apabila sampah tersebut tidak dikelola secara benar, maka akan menimbulkan berbagai macam masalah, diantaranya masalah bau busuk, munculnya bibit penyakit, mengganggu estetika dan lainnya. Pada gilirannya akan berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Sehingga langsung mempengaruhi sendi-sendi kehidupan di masyarakat.

Permasalahan tentang sampah memang menjadi isu yang meresahkan bagi seluruh kota di Indonesia pada umumnya. Permasalahan sampah di Indonesia menjadi kompleks dan meluas terutama terkait isu pencemaran sampah di laut. Pada tahun 2015, peneliti dari Universitas Georgia yang dipimpin oleh Jenna Jambeck mengungkapkan bahwa potensi sampah plastik di lautan Indonesia mencapai 18,72 ton/ tahun. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai Negara ke-2 terbesar di dunia yang menyumbang sampah ke laut setelah China. Disinyalir salah satu penyebab tingginya volume sampah yang dibuang ke laut adalah cakupan penanganan sampah oleh pemerintah yang masih sangat rendah. Sampah yang berhasil dikumpulkan oleh petugas

kebersihan Indonesia hanya sekitar 16,7 ton per tahun, sementara sampah yang tidak terkumpul sekitar 116 juta ton per tahun.

Menurut UU No. 18 tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh jaringan *Brorivai Center, Research and Response (R & R) Network Office Jakarta*, jumlah sampah padat yang diproduksi secara nasional mencapai mencapai 151.921 ton per hari. Artinya, setiap penduduk Indonesia secara rata-rata diasumsikan membuang sampah padat sebesar 0,85 kilogram setiap harinya. Berbeda dengan data yang disajikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016 yang mencatat produksi sampah mencapai 64 juta ton per tahun, dan komposisi sampah: organik 60%, plastik 15%, kertas 10%, lainnya (metal, kaca, kain, kulit) 15%. Sementara, pengolahan sampah di Indonesia yakni sebagian besar sampah dikirim ke TPA (69%), 7,5% kompos dan daur ulang, pembakaran terbuka 5%, ditimbun 10% dan tidak ada perlakuan 8,5%. Sehingga dapat digambarkan tentang kritis persoalan sampah jika dilihat dari skala nasional. Untuk itu perlu penanganan dan manajemen sampah yang baik, baik langkah untuk pencegahan dan langkah penanganan sampah.

Jumlah sampah yang terus meningkat adalah keniscayaan, seiring dengan bertambahnya penduduk. Masyarakat dengan tingkat konsumsi tinggi menghasilkan produksi sampah yang tinggi pula. Dalam skala komunal, bentuk pengelolaan sampah organik dengan berbasis 3R dalam bentuk tempat pengelolaan sampah 3R adalah peluang dalam rangka mengurangi jumlah

sampah yang akan masuk ke TPA, misalnya dengan metode pengomposan maupun dengan cara pencacahan. Tahun 2016, jumlah TPS 3R di Indonesia sebanyak 981 yang tersebar di seluruh kabupaten/ kota di Indonesia. Namun tingkat keberfungsian baru sebesar 10% yang difungsikan dengan baik, 37,5% difungsikan tetapi belum optimal dan belum difungsikan sebesar 52,5%.

Kabupaten Semarang sebagai salah satu daerah penyangga Ibukota Jawa Tengah dapat dikatakan sebagai daerah yang cukup tinggi tingkat produksi sampahnya, hal tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Semarang yang berbanding lurus dengan meningkatnya pula timbulan sampah yang dihasilkan. Tanpa adanya pengelolaan dan pengolahan sampah dengan baik maka masalah sampah ini akan menjadi masalah yang serius di masa yang akan datang seperti yang dihadapi kota Jakarta saat ini. Banyaknya sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan ketidaknyamanan, bau tidak sedap, gangguan pernafasan, dan menjadi vektor berbagai penyakit.

Sarana penampungan sampah di Kabupaten Semarang sangat bervariasi di setiap kecamatan antara lain menggunakan tong/ bak sampah, gerobak sampah dan truk pengangkut sampah. Adapula yang ditimbun atau langsung dibakar pada lokasi penghasil sampah. Tidak semua kecamatan dapat memperoleh fasilitas bak sampah, sehingga perlu pengolahan sampah ditingkat rumah tangga untuk mengurangi volume sampah.

Mengutip dari Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang tahun 2016-2021, persentase pelayanan penanganan sampah yang relative kecil tersebut diakibatkan adanya beberapa faktor, yakni:

1. Sebaran penduduk di Kabupaten Semarang adalah 88% di wilayah pedesaan, yaitu dari total 325 desa/ kelurahan sebanyak 208 adalah desa. Hal ini berakibat bahwa sebagian besar penduduk masih memanfaatkan lahan yang ada di desa untuk pembuangan sampah secara mandiri.
2. Cakupan armada, personil, dan sarana prasarana persampahan yang terbatas, yaitu hanya cukup untuk melayani daerah perkotaan dan ibukota kecamatan.

Meskipun disadari bahwa wilayah Kabupaten Semarang merupakan wilayah padat penduduk dan memiliki karakteristik masyarakat yang sangat majemuk, tidaklah berarti masalah sampah tidak dapat diatasi secara baik, melalui *Co-management* atau *collaborative management* sebagai pendekatan berbasis kemitraan yang dikembangkan sebagai respon dari kelemahan-kelemahan terhadap pendekatan sebelumnya, seperti *state-based* dan *community based* dalam pengelolaan lingkungan. Pada pendekatan pertama (*state based*), kelemahan yang paling mendasar adalah kurangnya partisipasi masyarakat, sedangkan pada pendekatan *community based*, faktor kemampuan dan pendanaan menjadi kendala utama. *Co-management* merupakan bentuk pengelolaan lingkungan yang adaptif, inovatif, dan organik. Pada prinsipnya,

penerapan *co-management* merupakan bentuk dari sharing atau pembagian wewenang dan manfaat.

Dengan adanya Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola masalah sampah yang ada di daerahnya. Untuk itu tindakan berupa aksi nyata yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan sampah sangatlah dibutuhkan mengingat persoalan sampah tampaknya tidak akan selesai begitu saja tanpa menghadirkan suatu sistem pengelolaan yang mencakup berbagai elemen-elemen dalam hal ini lembaga atau instansi pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang berwenang untuk membuat kebijakan yang dilengkapi dengan peraturan, pembiayaan atau pendanaan, peralatan penunjang yang semuanya terintegrasi kedalam suatu sistem, disamping kesadaran masyarakat itu sendiri.

Salah satu alternatif pengelolaan sampah yang dikembangkan di Kabupaten Semarang yaitu dengan penyelenggaraan TPS 3R. Tujuan dari diselenggarakannya program TPS 3R tidak lain untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan TPS 3R, meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pengelolaan sampah dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi masyarakat, menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang berkualitas, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya air dan lingkungan, mengurangi beban pengolahan sampah di TPA

dengan mengurangi timbulan sampah di sumbernya, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat.

Program TPS 3R merupakan program dari pemerintah pusat yang diimplementasikan di daerah-daerah yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Dimana program nasional tersebut menyasar daerah-daerah yang memenuhi kriteria kesiapan untuk menerima dan menjalankan program tersebut. Tidak semua Kabupaten/ Kota di Indonesia menerima bantuan program pengelolaan sampah berbasis TPS 3R. Kabupaten Semarang menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan kuota 1 (satu) unit bangunan TPS 3R dari 17 titik yang tersebar di berbagai kota/kabupaten se-Jawa Tengah melalui Satuan kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman atau yang sekarang disebut dengan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi Jawa Tengah. Untuk pertama kalinya program TPS 3R di Kabupaten Semarang diimplementasikan di Desa Bergas Kidul.

Desa Bergas Kidul sebagian wilayahnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang menjadi wilayah industri. Perusahaan yang berdiri di wilayah tersebut antara lain PT Sidomuncul, PT Sosro, PT Perusahaan Bapak Djenggot dan beberapa perusahaan lainnya. Hal ini mengakibatkan peningkatan populasi penduduk yang sangat cepat dan tinggi, selain itu juga mengakibatkan percepatan kepadatan di wilayah Bergas Kidul dan menimbulkan persoalan berkaitan dengan sampah. Apalagi jika tidak disertai dengan perencanaan tata kelola wilayah yang baik, tidak disertai

dengan penyediaan tempat pembuangan sampah yang cukup memadai dan kebijakan yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat untuk berperilaku bersih, sehat dan ramah lingkungan.

Penanganan sampah di Desa Bergas Kidul sendiri awalnya hanya dikumpulkan di satu lokasi dengan pemilahan sederhana yakni dengan memilah dan memanfaatkan sampah yang bernilai ekonomis, seperti kardus, botol beling yang masih utuh, dan kemasan air mineral. Namun permasalahannya, sampah yang tidak terpakai menjadi semakin bertambah dan menumpuk. Bahkan, lantaran penanganan sampah yang masih bersifat *open dumping* ini sering menimbulkan protes dari para petani di sekeliling lokasi penimbunan sampah. Sebab jika angin kencang, sampah masuk ke areal persawahan. Sebelum pembangunan fisik TPS 3R pernah dilakukan survei sederhana untuk mengetahui timbulan sampah di masyarakat. Survei dilakukan selama delapan hari berturut-turut terhadap 40 rumah tangga sebagai sampling. Hasilnya, setiap orang di Desa Bergas Kidul ini tercatat menghasilkan sampah rata-rata orang 0,34 kilogram setiap hari. (sumber: semarangkab.go.id)

Dikarenakan program pengelolaan sampah berbasis TPS 3R yang diselenggarakan di Bergas Kidul merupakan suatu aktivitas yang baru pertama kali dilakukan di wilayah Kabupaten Semarang sehingga pemerintah Kabupaten Semarang menetapkan TPS 3R di Desa Bergas Kidul tersebut sebagai TPS 3R percontohan, yang dimana kedepannya diharapkan akan mendorong lahirnya TPS 3R lainnya di Kabupaten Semarang. Maka berangkat

dari hal tersebut fokus penelitian ini lebih kepada menganalisis pihak-pihak yang terlibat dalam program TPS 3R serta menganalisis bentuk kemitraan yang terjalin di dalam proses pelaksanaan program TPS 3R tersebut.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana realisasi pemetaan *stakeholders* dalam program pengelolaan sampah berbasis TPS 3R di Desa Bergas Kidul tahun 2017-2018?
2. Bagaimana pelaksanaan kemitraan diantara para *stakeholders* dalam program pengelolaan sampah berbasis TPS 3R di Desa Bergas Kidul tahun 2017-2018?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan utama dari penelitian ini adalah mengidentifikasi realisasi pemetaan *stakeholders* dalam program pengelolaan sampah berbasis TPS 3R di Desa Bergas Kidul Kabupaten Semarang pada tahun 2017-2018, dengan adanya kemitraan tersebut bertujuan untuk mendorong semakin banyaknya daerah yang masuk ke dalam kategori daerah yang bersih serta mendorong lahirnya TPS 3R lainnya di Kabupaten Semarang, selain itu dengan adanya kemitraan diharapkan ada kerjasama antarwilayah dalam pengelolaan sampah.
2. Menganalisis pelaksanaan kemitraan diantara para *stakeholders* dalam program pengelolaan sampah di Desa Bergas Kidul Kabupaten Semarang.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para pihak yang berminat maupun terkait dengan masalah pengelolaan sampah, khususnya kepada:

1.4.1. Manfaat teoritis

1.4.1.1. Penelitian ini dapat digunakan dengan memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dan memberikan informasi umum mengenai realisasi pemetaan *stakeholders* dalam program pengelolaan sampah berbasis TPS 3R di Desa Bergas Kidul Kabupaten Semarang pada tahun 2017-2018, serta pelaksanaan pola kemitraan diantara para *stakeholders*. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pola kemitraan dalam pengelolaan sampah di daerah yang dimulai pada tingkatan terendah yakni desa.

1.4.2. Manfaat praktis

1.4.2.1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi pertimbangan untuk pemerintah untuk memperhatikan potensi wilayah dalam hal pengelolaan sampah yang efektif, efisien, proporsional, partisipatif, dan berwawasan lingkungan demi mendorong semakin banyaknya TPS 3R yang lahir di Kabupaten Semarang.

1.4.2.2. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah serta mendorong masyarakat untuk dapat mewujudkan kedisiplinan dalam mengelola sampah.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Adapun terdapat beberapa bentuk penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan berkaitan dengan kemitraan, diantaranya :

Tabel 1.1**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Pengarang Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
1	Siti Patimah	Kemitraan Kolaboratif Pemerintah Daerah SARBAGITA (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) Dengan Pihak Swasta PT NOEI Dalam Pengelolaan Sampah Di Wilayah SARBAGITA	Metode Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa kemitraan yang dilakukan menggunakan bentuk BOO sehingga pemerintah terbantu dalam hal pendanaan. Namun jika dilihat dari segi keefektifannya, kemitraan yang terjalin belu sepenuhnya berjalan efektif.
2	Sheilla Nur Setianingsih, 2018	Kemitraan Antara Desa Dalangan Dengan Desa Jimus Dan Desa Ngaran Dalam Program Pamsimas	Mixed Method	Kemitraan antara Desa Dalangan dengan Desa Jimus dan Desa Ngaran dalam program pamsimas dapat dikatakan berhasil. Kemitraan antara Desa Dalangan dengan Desa Jimus dan Desa Ngaran sudah baik namun tidak adanya keterlibatan masyarakat Desa Dalangan di dalam proses perencanaan hingga pengelolaan menjadi masalah serius dalam kemitraan tersebut karena akan menimbulkan perasaan tidak peduli terhadap sesama.

3	Imelda Merry Melyanti	Pola Kemitraan Pemerintah, Civil Society, dan Swasta Dalam Program Bank Sampah Di Pasar Baru Kota Probolinggo	Metode Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan pola kemitraan yang terjalin antara pemerintah, civil society, dan swasta tergolong dalam jenis kemitraan mutualistik. Untuk peran pemerintah, civil society dan swasta secara umum mereka bersama-sama merencanakan dan melaksanakan. Secara khusus pemerintah sebagai penguat komitmen, mendampingi dan berkontribusi baik fisik maupun non fisik. Pihak swasta berperan juga dalam berkontribusi baik fisik maupun non fisik, serta civil society sebagai pelaksana bank sampah.
4	Zulfan Nahrudin, 2016	Kemitraan Publik-Privat Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tamangapa Kota Makassar	Metode Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa dari pelaksanaan kemitraan antara pemerintah kota makassar dengan PT. Gikoko Kogyo Indonesia memberikan gambaran dan analisa bahwa kemitraan ini tidak efektif dalam mengatasi permasalahan persampahan di sekitar TPA Tamangapa hal ini dilihat dari output dan outcome yang tercapai yakni perbaikan kondisi lingkungan TPA hanya mampu mengurangi masalah bau sampah yang bersumber dari TPA tetapi tidak dapat mengatasi permasalahan sampah secara keseluruhan.

5	Angela Chatly,2016	Pengelolaan Sampah Pantai Oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Bandar Lampung (Studi Pada Pantai Sukaraja Kecamatan Bumi Waras)	Meted Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah secara kolaborasi oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung yang dilaksanakan bersama-sama dengan LSM Mitra Bentala belum berjalan optimal. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung memfasilitasi program. Sementara, LSM Mitra Bentala menjalankan program bersih pantai seperti pembentukan kader pesisir salah satunya dipilih dari masyarakat Sukaraja, pemungutan sampah pantai, dan memberikan pembinaan serta pelatihan kepada para kader mengenai cara mengurangi timbulan sampah. Kader di Sukaraja hanya memungut sampah di pantai saja. Kegiatan pengurangan sampah seperti bank sampah belum dapat dibentuk kader di Sukaraja sebab rendahnya kepedulian masyarakat untuk mengelola sampah. Maka itu, tujuan dari pengelolaan sampah di pantai sebagai upaya penataan pesisir agar sehat dan bersih belum dapat diwujudkan di Sukaraja.
---	--------------------	--	-----------------------------	--

Berdasarkan Tabel 1.1 perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni terletak pada fokus penelitian pada salah satu program pengelolaan sampah yakni TPS 3R dan lokasi penelitiannya mengambil

tingkat desa. Penelitian ini lebih memfokuskan mengidentifikasi pemetaan *stakeholders* dalam program pengelolaan sampah berbasis TPS 3R di Desa Bergas Kidul pada tahun 2017-2018, serta Menganalisis pelaksanaan kemitraan diantara para *stakeholders* dalam program pengelolaan sampah berbasis TPS 3R di Desa Bergas Kidul Kabupaten Semarang.

1.6. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1. Konsep Kemitraan

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* dan berasal dari akar *partner*. *Partner* diterjemahkan sebagai “pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon”. Sedangkan *partnership* diterjemahkan sebagai persekutuan atau perkongsian. Sehingga kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas disuatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik (Sulistiyani, 2004: 129-130).

1.6.2. Dasar Pemikiran Kemitraan

Dasar Pemikiran Kemitraan (*partnership*) pada dasarnya berada dalam argumen tentang peran dan posisi negara dalam relasi (hubungan) negara (*State*) dan masyarakat (*Society*). Penjelasan terhadap hubungan (relasi) ini adalah pembicaraan paling klasik dalam pengetahuan Ilmu Sosial. Paling tidak ada 3 pemikiran yang telah menjelaskan, yaitu:

1. Perspektif Pasar (*market system*) yang dapat ditelusuri dalam teori ekonomi klasik dari Adam Smith (1723-1790) sampai New Public Management dalam karya David Osborne (1992). Dalam perspektif ini bermula dari pemisahan tegas atau tidak ada hubungan sama sekali antara negara dengan masyarakat (baik dalam bentuk privat maupun komunitas) sampai pandangan yang mengarahkan pelibatan negara dalam urusan pasar.
2. Perspektif Demokrasi yang dapat ditelusuri dalam teori Democratic Administration sejak Max Weber (Ostrom, 1973) sampai New Public Services dalam karya Denhardt and Denhardt (2003). Bell dan Watkins (1996) yang menyebutkan bahwa Partnership atau kemitraan tersebut berada dalam ruang pembatasan 4 tipologi hubungan interorganisasi, yaitu: koordinasi, kompetisi, kooperasi, kolaborasi.

1.6.3. Derajat Kemitraan

Dalam format *networking* terdapat beberapa jenis *inter governmental networks*, sesuai urutan derajat *networks*-nya yang dikemukakan oleh (Robert Agranoff, 2003) dimulai dari :

1. *Informations networks*, yakni jenis jaringan kerjasama yang paling ringan derajatnya. Pada jenis ini beberapa daerah kabupaten/ kota dapat membuat sebuah forum yang berfungsi sebagai pertukaran kebijakan dan program, teknologi, dan solusi atas masalah-masalah bersama.

2. *Developmental networks*, yakni kaitan antar daerah yang terlibat lebih kuat, karena selain pertukaran informasi juga dibarengi dengan pendidikan dan pelayanan secara langsung dapat meningkatkan kapasitas informasi daerah untuk mengatasi masalah di daerah masing-masing.
3. *Outreach networks*, yakni adanya penyusunan program dan strategi untuk masing-masing daerah yang diadopsi dan dilaksanakan oleh daerah lain (biasanya melalui fasilitas organisasi partner).
4. *Action networks*, yakni bentuk *inter-governmental networks* yang paling solid. Dalam bentuk ini daerah-daerah yang menjadi anggota secara bersama-sama menyusun program aksi bersama sesuai proporsi dan kemampuan masing-masing (Agranoff, 2003 dalam Hadi Warsono, 2009).

1.6.4. Prinsip-Prinsip Kemitraan

Kemitraan memiliki prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Wibisono merumuskan tiga prinsip penting dalam kemitraan, yaitu:

1. Kesetaraan atau keseimbangan (*equity*).

Pendekatannya bukan top down atau bottom up, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya. Untuk menghindari antagonisme perlu dibangun rasa saling percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan.

2. Transparansi.

Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan.

3. Saling menguntungkan.

Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

1.6.5. Tujuan Kemitraan

Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah “*win-win solution partnership*”. Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Berdasarkan pendekatan cultural, kemitraan bertujuan agar mitra usaha dapat mengadopsi nilai-nilai baru dalam berusaha seperti perluasan wawasan, prakarsa, kreativitas, berani mengambil resiko, etos kerja, kemampuan aspek-aspek manajerial, bekerja atas dasar perencanaan, dan berwawasan kedepan. Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkrit adalah:

- a) Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat;
- b) Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku kemitraan;
- c) Meningkatkan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil;

- d) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional;
- e) Memperluas lapangan kerja;
- f) Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

1.6.6. Pola Kemitraan

Dalam proses implementasinya, kemitraan yang dijalankan tidak selamanya ideal karena dalam pelaksanaannya kemitraan yang dilakukan didasarkan pada kepentingan pihak yang bermitra. Menurut Notoatmodjo, kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Menurut Louis E. Boone dan David L. Kurtz kemitraan juga termasuk *partnership* merupakan afiliasi dari dua atau lebih perusahaan dengan tujuan bersama, yaitu saling membantu dalam mencapai tujuan bersama. Menurut Keint L. Fletcher dan Kamus Besar Bahasa Indonesia memandang kemitraan sebagai suatu jalinan kerjasama usaha untuk tujuan memperoleh keuntungan. Berbeda dengan Muhammad Jafar Hafshah dan Ian Linton yang memandang kemitraan sebagai suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

Kemitraan adalah upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun lembaga bukan pemerintah untuk bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing. Adapun pola kemitraan menurut Sulistiyani

(2004:130-131) diilhami dari fenomena biologis kehidupan organisme dan mencoba mengangkat ke dalam pemahaman yang kemudian dibedakan menjadi berikut :

1. Pseudo partnership atau kemitraan semu

Kemitraan semu adalah merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

2. Kemitraan mutualistik

Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal. Berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua agen/ organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat

diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjang satu sama lain.

3. Kemitraan Konjugasi

Kemitraan Konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan “paramecium”. Dua paramecium melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

Sedangkan kemitraan yang lain dikembangkan berdasar atas azas kehidupan organisasi pada umumnya adalah (Sulistiyani 2004:131-132):

1. *Subordinate union of partnership*

Yaitu kemitraan atas dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang berhubungan secara subordinatif. Kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Dengan demikian hubungan yang tercipta tidak berada dalam suatu garis lurus yang seimbang satu dengan lainnya, melainkan

berada pada hubungan atas bawah, kuat-lemah. Oleh karena kondisi demikian ini mengakibatkan tidak ada sharing dan peran atau fungsi yang seimbang.

2. *Linear union of partnership*

Kemitraan dengan melalui penggabungan pihak-pihak secara linear atau garis lurus. Dengan demikian pihak-pihak yang bergabung untuk melakukan kerjasama adalah organisasi atau para pihak yang memiliki persamaan secara relatif. Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan, atau misi, besaran/ volume usaha atau organisasi, status atau legalitas.

3. *Linear collaborative of partnership*

Dalam konteks kemitraan ini tidak membedakan besaran atau volume, status/ legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. Yang menjadi tekanan utama adalah visi-misi yang saling mengisi satu dengan lainnya. Dalam hubungan kemitraan ini terjalin secara linear, yaitu berada pada garis lurus, tidak saling tersubordinasi.

Dalam proses implementasinya, kemitraan yang dijalankan tidak selamanya ideal karena dalam pelaksanaannya kemitraan yang dilakukan didasarkan pada kepentingan pihak yang bermitra. Menurut Wibisono, Kemitraan yang dilakukan antara perusahaan dengan pemerintah maupun komunitas/ masyarakat dapat mengarah pada tiga pola, diantaranya:

1. Pola kemitraan kontra produktif

Pola ini akan terjadi jika perusahaan masih berpijak pada pola konvensional yang hanya mengutamakan kepentingan *shareholders* yaitu mengejar profit sebesar-besarnya. Fokus perhatian perusahaan memang lebih bertumpu pada bagaimana perusahaan bisa meraup keuntungan secara maksimal, sementara hubungan dengan pemerintah dan komunitas atau masyarakat hanya sekedar pemanis belaka. Perusahaan berjalan dengan targetnya sendiri, pemerintah juga tidak ambil peduli, sedangkan masyarakat tidak memiliki akses apapun kepada perusahaan. Hubungan ini hanya menguntungkan beberapa oknum saja, misalnya oknum aparat pemerintah atau preman ditengah masyarakat. Biasanya, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan hanyalah digunakan untuk memelihara orang-orang tertentu saja. Hal ini dipahami, bahwa bagi perusahaan yang penting adalah keamanan dalam jangka pendek.

2. Pola Kemitraan Semiproduktif

Dalam skenario ini pemerintah dan komunitas atau masyarakat dianggap sebagai obyek dan masalah diluar perusahaan. Perusahaan tidak tahu program-program pemerintah, pemerintah juga tidak memberikan iklim yang kondusif kepada dunia usaha dan masyarakat bersifat pasif. Pola kemitraan ini masih mengacu pada kepentingan jangka pendek dan belum atau

tidak menimbulkan sense of belonging di pihak masyarakat dan low benefit di pihak pemerintah. Kerjasama lebih mengedepankan aspek karitatif atau public relation, dimana pemerintah dan komunitas atau masyarakat masih lebih dianggap sebagai objek. Dengan kata lain, kemitraan masih belum strategis dan masih mengedepankan kepentingan sendiri (*self interest*) perusahaan, bukan kepentingan bersama (*commont interest*) antara perusahaan dengan mitranya.

3. Pola Kemitraan Produktif

Pola kemitraan ini menempatkan mitra sebagai subyek dan dalam paradigma *commont interest*. Prinsip simbiosis mutualisme sangat kental pada pola ini. Perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, pemerintah memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat memberikan dukungan positif kepada perusahaan. Bahkan bisa jadi mitra dilibatkan pada pola hubungan *resourced based partnership*, dimana mitra diberi kesempatan menjadi bagian dari *shareholders*.

1.6.7. *Teori Process Conditions*

Kemitraan dapat dikatakan berhasil jika mampu memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan yang disesuaikan pada kondisi yang mungkin sewaktu-waktu dapat berubah. Untuk mampu membangun sebuah kemitraan yang berhasil, harus didasarkan pada kesamaan perhatian (*common interest*) atau kepentingan, saling mempercayai dan saling menghormati, adanya tujuan

yang jelas dan terukur, serta kesediaan untuk berkorban baik, waktu, tenaga, maupun sumber daya yang lainnya. Kouwenhoven berpendapat untuk menjamin keberhasilan kemitraan, diperlukan kondisi-kondisi berikut yang juga dikenal sebagai *process conditions*, yaitu :

a. *Mutual Trust*

Kemitraan akan dapat berhasil dijalankan apabila pihak-pihak yang bekerja sama saling memiliki sikap kepercayaan terhadap satu sama lain.

b. *Unambiguity and recording of objectives ad strategy*

Keberhasilan sebuah kemitraan didasarkan pada kondisi yang tidak menimbulkan pernyataan maupun sikap yang terkesan ambigu serta memiliki segala hal yang berhubungan dengan kerja sama tertulis dalam pencatatan yang objektif, selain itu adanya kemitraan harus didasarkan pada kondisi yang strategis.

c. *Unambiguity and recording of the division of costs, risks, and returns*

Dalam melakukan hubungan kemitraan yang berkaitan dengan biaya, segala bentuk pencatatan biaya, resiko dan imbalan harus seimbang dan jelas, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait.

d. *Unambiguity and recording of the division of responsibilities and authorities*

Segala bentuk keputusan dan kewenangan yang telah disepakati bersama dalam proses kemitraan harus saling dilaksanakan dengan tanggungjawab secara penuh.

e. *Phasing of the project*

Proses berjalannya sebuah kemitraan didasarkan pada tahapan-tahapan program yang jelas dan terarah.

f. *Conflict regulation laid down beforehand*

Untuk menghindari adanya penyelewengan kesepakatan, perlu adanya peraturan konflik terlebih dahulu, sehingga pihak-pihak yang terkait memiliki rasa tanggung jawab terhadap segala keputusan yang telah disepakati.

g. *Legality*

Adanya keabsahan terhadap proses kemitraan yang dilaksanakan. Artinya, kesepakatan adanya kerja sama diakui dan bersifat sah.

h. *Protection of third parties interests and rights*

Perlu adanya perlindungan dari pihak ketiga, sehingga pihak-pihak yang bekerjasama tidak memiliki keinginan untuk menjatuhkan salah satu pihak.

i. *Adequate support and control facilities*

Dalam menjalankan kemitraan, perlu adanya saling mendukung dan saling mengontrol fasilitas demi mewujudkan keuntungan bersama.

j. *Business and market oriented thinking and acting*

Kemitraan adalah sebuah bisnis yang berorientasi pada cara berpikir dan bertindak.

k. *Internal coordination*

Kemitraan mengharuskan adanya koordinasi internal untuk menghindari resiko kecurangan kerja.

l. *Adequate project organization*

Kemitraan merupakan sebuah organisasi proyek yang harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai.

1.6.8. Konsep *Co-Management*

Co-management atau *collaborative management* sebagai pendekatan berbasis kemitraan dikembangkan sebagai respon dari kelemahan-kelemahan terhadap pendekatan sebelumnya, seperti *state-based* dan *community based* dalam pengelolaan lingkungan. Pada pendekatan pertama (*state based*), kelemahan yang paling mendasar adalah kurangnya partisipasi masyarakat, sedangkan pada pendekatan *community based*, faktor kemampuan dan pendanaan menjadi kendala utama. *Co-management* merupakan bentuk pengelolaan lingkungan yang adaptif, inovatif, dan organik. Gindl dan

Wukovitsch (dalam Budiati, 2006), menyatakan bahwa penerapan *co-management* mampu meningkatkan ketersediaan SDA dan mampu mewujudkan *trust building* antarpihak. Glaser & Denharelt (dalam Budiati, 2006), menyebutkan bahwa kemitraan sebagai mekanisme untuk menyelaraskan kelebihan dan kekurangan komparatif berbagai pelaku yang berbeda dalam proses pengembangan serta menjamin eksploitasi sumber daya secara *mutual supportive* guna mencapai kekuatan kemitraan, disamping dapat meminimalkan kelemahan yang dimiliki. Penerapan *co-management* dimaksudkan sebagai suatu keinginan untuk memberdayakan masyarakat lokal, swasembada, kemandirian, dan keadilan sosial. Melalui *co-management* diharapkan mampu memperbaiki pengertian tentang apa yang diinginkan masyarakat, membantu masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan, meningkatkan komitmen, kesadaran dan kemandirian masyarakat, menyusun prioritas penyelesaiannya, mengurangi ketergantungan serta mewujudkan empowerment dalam komunitas (dalam Budiati, 2006).

1.6.9. Teori *Stakeholder*

Stakeholders dibagi menjadi tiga kelompok (Maryono et al. 2005) dalam penelitian (Yosevita:25) antara lain :

a. *Stakeholders* primer

Stakeholders primer merupakan stakeholders yang terkena dampak secara langsung baik dampak positif maupun dampak negative dari suatu rencana serta mempunyai kaitan kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut. Stakeholders yang memiliki pengaruh

dan kepentingan dikatakan sebagai *stakeholders* primer dan harus dilibatkan penuh dalam tahapan-tahapan kegiatan.

b. *Stakeholders* kunci

Stakeholders kunci adalah mereka yang memiliki kewenangan legal dalam hal pengambilan keputusan.

c. *Stakeholders* sekunder atau pendukung

Stakeholders pendukung merupakan *stakeholders* yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap suatu rencana tetapi memiliki kepedulian yang besar terhadap proses pengembangan. *Stakeholders* pendukung meliputi para investor atau pihak swasta, LSM, dan fasilitator.

Tahapan pertama dalam menganalisis *stakeholders* adalah menetapkan “pengaruh” dan “kepentingan” (Reed et al.2009; Thompso, 2011; Gardner et al. 1986) dalam penelitian (Kadir Wakka:10) :

- a. Subjek : *stakeholders* dengan tingkat kepentingan yang tinggi dan tetapi memiliki pengaruh yang rendah.
- b. Pemain kunci (*key players*): *stakeholders* dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi.
- c. Pengikut lain (*crowd*): *stakeholders* dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah.
- d. Pendukung (*contest setters*): *stakeholders* dengan tingkat kepentingan yang rendah tetapi memiliki pengaruh yang tinggi.

Menurut Nugroho (2014, h.16-17) dalam penelitian Ali dkk, stakeholders dalam program pembangunan diklasifikasikan berdasarkan peranannya, antara lain :

- a) *Policy creator* yaitu *stakeholders* yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.
- b) *Coordinator* yaitu *stakeholders* yang berperan mengkoordinasikan *stakeholders* lain yang terlibat.
- c) Fasilitator yaitu *stakeholders* sebagai fasilitator yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran.
- d) Akselerator yaitu *stakeholders* yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

1.7. Operasionalisasi Konsep

Menurut Sugiyono (2012:31) definisi operasional adalah penentuan konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variable yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstruk, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstruk yang lebih baik.

Sedangkan menurut Nani Darmayanti (dalam Mushlihin 2013) definisi operasional adalah rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan dan penelitian karya ilmiah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat variable yang diamati. Operasional mencakup hal-hal penting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan. Operasional bersifat spesifik, rinci, tegas dan pasti yang menggambarkan karakteristik variable-variabel penelitian dan hal-hal yang dianggap serius.

Dalam penelitian ini, fenomena yang akan dikaji oleh peneliti yaitu analisis pola kemitraan antara stakeholders dalam program pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang tahun 2017-2018 dengan mengambil studi kasus pengelolaan sampah berbasis TPS 3R di Desa Bergas Kidul.

1. Kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai tugas dan tujuan tertentu. Kemitraan juga diartikan sebagai upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, maupun lembaga bukan pemerintah untuk bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing.
2. Program TPS 3R merupakan program dari pemerintah pusat yang diimplementasikan di daerah-daerah untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengurangi kuantitas dan/atau memperbaiki

karakteristik sampah, yang akan diolah secara lebih lanjut di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis pola kemitraan antara *stakeholders* dalam program pengelolaan sampah di Desa Bergas Kidul Kabupaten Semarang tahun 2017-2018 dengan mengambil studi kasus pengelolaan sampah berbasis TPS 3R di Desa Bergas Kidul dengan menggunakan indikator yang menentukan keberhasilan suatu kemitraan yang terdiri dari :

1. ***Mutual Trust***, Kemitraan akan dapat berhasil dijalankan apabila pihak-pihak yang bekerja sama saling memiliki sikap kepercayaan terhadap satu sama lain.
2. ***Unambiguity and recording of objectives ad strategy***, Keberhasilan sebuah kemitraan didasarkan pada kondisi yang tidak menimbulkan pernyataan maupun sikap yang terkesan ambigu serta memiliki segala hal yang berhubungan dengan kerja sama tertulis dalam pencatatan yang objektif, selain itu adanya kemitraan harus didasarkan pada kondisi yang strategis.
3. ***Unambiguity and recording of the division of costs, risks, and returns***, Dalam melakukan hubungan kemitraan yang berkaitan dengan biaya, segala bentuk pencatatan biaya, resiko dan imbalan harus seimbang dan jelas, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait.

4. ***Unambiguity and recording of the division of responsibilities and authorities***, Segala bentuk keputusan dan kewenangan yang telah disepakati bersama dalam proses kemitraan harus saling dilaksanakan dengan tanggungjawab secara penuh.
5. ***Phasing of the project***, Proses berjalannya sebuah kemitraan didasarkan pada tahapan-tahapan program yang jelas dan terarah.
6. ***Legality***, Adanya keabsahan terhadap proses kemitraan yang dilaksanakan. Artinya, kesepakatan adanya kerja sama diakui dan bersifat sah.
7. ***Adequate support and control facilities***, Dalam menjalankan kemitraan, perlu adanya saling mendukung dan saling mengontrol fasilitas demi mewujudkan keuntungan bersama.
8. ***Business and market oriented thinking and acting***, Kemitraan adalah sebuah bisnis yang berorientasi pada cara berpikir dan bertindak.
9. ***Internal coordination***, Kemitraan mengharuskan adanya koordinasi internal untuk menghindari resiko kecurangan kerja.
10. ***Adequate project organization***, Kemitraan merupakan sebuah organisasi proyek yang harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Desain Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2002). Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif, lebih lanjut mementingkan proses dibandingkan dengan hasil akhir. Oleh karena itu, urutan-urutan kegiatan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini menganalisis dan mengidentifikasi pola kemitraan yang terjalin diantara Pemerintah Kabupaten Semarang selaku pihak yang mempunyai kewenangan dalam urusan pelestarian lingkungan utamanya terkait pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Semarang dengan Kelompok Swadaya Masyarakat Bergas Sehat Berseri selaku pihak yang pelaksana pengelolaan sampah di Lingkungan Krajan Desa Bergas Kidul Kabupaten Semarang.

1.8.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang banyak digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011), penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau

menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual.

1.8.3. Situs Penelitian

Situs penelitian adalah suatu tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Sesuai dengan penelitian maka tempat ataupun objek yang akan diteliti adalah Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R di Desa Bergas Kidul dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang.

1.8.4. Subjek Penelitian

Menurut Spradley (dalam Moleong, 2002), informan harus memiliki beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- 1) Subjek yang telah lama intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
- 2) Subjek masih terikat penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
- 3) Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
- 4) Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Penentuan informan dalam penelitian ini dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

Informan kunci dalam penelitian ini yaitu Kepala Sie Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang Bapak Agus Dwi Cahyadi, S.T, Kepala Bidang III Pelestarian Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang Bapak Budi Doyo, S.H, M.Si, Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Bergas Sehat Berseri Bapak Abdul Aziz..

1.8.5. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan sumber data, sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari lapangan. Data primer berasal dari wawancara dan studi dokumentasi.

2. Data sekunder

Data Sekunder adalah catatan tentang adanya peristiwa yang sudah ada sebelumnya, dokumen, laporan dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder bisa berupa tabel, laporan dan dokumen dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang serta dokumen yang ada di Kelompok Swadaya Masyarakat Bergas Sehat Berseri.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penting untuk menentukan ketepatan hasil yang diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif terdiri dari wawancara, dan studi kepustakaan.

1.8.7. Analisis dan Intrepretasi Data

Pada penelitian ini akan menggunakan triangulasi sumber yaitu teknik pengumpulan data dari berbagai sumber dan dianalisis untuk mengambil kesimpulan dari data-data tersebut. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deksriptif yang bersifat eksploratif, dimana peneliti menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dan mengambil kesimpulan.